

PENGEMBANGAN PENATAAN KAWASAN PESISIR UTARA JAKARTA BERDASARKAN NCICD

Medina Suci Handayani

Program Studi Teknik Arsitektur, FTSP, Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta

Medina.suci.handayani@gmail.com

Abstrak

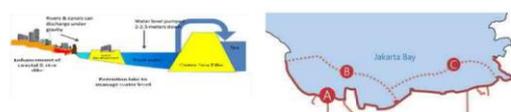
Perencanaan dan program NCICD yang bertujuan untuk melindungi kawasan Jakarta utara dari Banjir rob dari laut telah dimulai sejak tahun 2012 yang dikenal dengan JCDS (Jakarta Coastal Defence Strategy), yakni dengan melakukan pembangunan/perkuatan tanggul di darat (on-shore) dan kemudian membangun tanggul lepas pantai (off-shore). Wilayah studi JCDS ini hanya mencakup wilayah Jakarta Utara. Oleh karena perkembangan skema pembiayaan, pada tahun 2016 Master Plan NCICD diaktualkan, disamping tetap melakukan rencana pada tahun 2012, terdapat penambahan komponen pembangunan yaitu pembangunan tanggul darat segera mungkin (emergency on-shore), pengembangan 17 buah pulau reklamasi dan pengembangan tanggul lepas pantai sepenuhnya hanya sebagai pilihan. Wilayah Master Plan NCICD (2012) mencakup DKI Jakarta dan Tangerang untuk bagian Barat dan DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi untuk Bagian Timur.

1. PENDAHULUAN

Bermula dari Identifikasi Muatan Program NCICD terkait perlindungan kawasan Jakarta utara dari banjir rob dari laut teluk Jakarta, KLHS akan mengidentifikasi KRP perencanaan dan program NCICD yang terakhir, yaitu IFSP 2019 yang dikembangkan PUPR dan Bappenas bersama konsultan Belanda dan Korea yang dikenal dengan Open Sea Dike.



Gambar 5.1 Sejarah Perencanaan dan Penyusunan Program NCICD



Gambar 5.2 Rencana inti dan Tahapan Pelaksanaan IFSP (2019)

2. METODOLOGI TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KAJIAN TEORI

METODOLOGI DAN KAJIAN MUATAN MENURUT KLHS

Tahap pengkajian muatan atau biasa disebut dengan Kajian 6 (enam) Muatan KLHS

merupakan inti kajian yang dilakukan dalam KLHS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dari PP 46/2016, hasil analisis paling sedikit memuat kajian :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

IDENTIFIKASI MATERI KRP DENGAN 7 KRITERIA

1. Perubahan Iklim
2. Kerusakan, kemerosotan dan kepunahan Biodiversity
3. Peningkatan Intensitas dan cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan dan atau kebakaran hutan dan lahan.
4. Penurunan Mutu dan kelimpahan SDA.
5. Peningkatan alih fungsi Kawasan hutan dan atau lahan.
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok Masyarakat.

7. Peningkatan resiko terhadap Kesehatan dan keselamatan manusia

3.HASIL DAN PEMBAHASAN Kapasitas DDDT-LH untuk Pembangunan Daya Dukung Sosial

Aspek sosial kajian KLHS penduduk pesisir utara Jakarta, akan mempelajari daya dukung sosial yaitu bagaimana institusi/mekanisme sosial dan ekonomi yang ada mampu mengelola struktur dan dinamika kehidupan masyarakat pesisir untuk bertahan hidup bersama. Perubahan pada salah satu unsur dalam proses bertahan hidup bersama akan menimbulkan akibat terduga Program NCICD untuk pengelolaan kondisi ekologi wilayah pesisir, secara langsung ataupun tidak langsung, akan menimbulkan dampak terhadap struktur dan dinamika aktivitas perikanan kedua kelompok tersebut. Untuk memahami dampak yang terjadi, dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan ekologi dan ekonomi politik. Kedua pendekatan tersebut satu sama lain saling melengkapi.

Rencana perlindungan banjir terpadu yang ditawarkan NCICD, bukan sekedar upaya mencegah ancaman Jakarta akan tenggelam akibat banjir rob, juga penurunan permukaan tanah akibat pemanfaatan air tanah secara berlebihan. Dalam jangka panjang program berupaya mengelola kuantitas, kualitas air laut dan air sungai yang masuk ke laut, sanitasi serta buruknya kondisi ekologi di daratan, hingga perencanaan pengembangan perkotaan modern dengan berbagai fasilitasnya.

Rekomendasi Isu Sosial Untuk pencapaian hasil tersebut (intended result) diperlukan :

- 1) Restrukturisasi pemukiman informal menjadi modern dan sehat;
- 2) Penyediaan akses pekerjaan dan peluang untuk mobilitas horizontal/sosial bagi penduduk yang di relokasi;

Untuk mencapai dua hal diatas, diperlukan :

- 1) Pemecahan persoalan kepemilikan lahan;
- 2) Merencanakan desain pemukiman dan sosialisasi secara intensif;
- 3) Legalitas pembangunan tanggul di wilayah Kabupaten Tangerang dan Bekasi.
- 4) Upaya legalisasi lahan, perencanaan pemukiman bagi penduduk, nelayan dan

non-nelayan, yang menetap di pesisir dan sosialisasi intensif, berpotensi menimbulkan persoalan/hasil tak terduga (un-intended result) terhadap kondisi sosial ekonomi warga pindahan dan potensi konflik

Isu Ekonomi Nelayan Kecil

tahap pembangunan tanggul A, memang mampu membantu meringankan pengeluaran tak terduga rumah tangga penduduk pesisir akibat banjir. Tetapi, manfaat tersebut relatif tidak mampu secara signifikan meningkatkan kehidupan mereka. Siklus subsistensi yang terjadi, melemahkan mereka untuk dapat mengakumulasi surplus yang dimiliki. Intensitas aktivitas melaut, pelabuhan perikanan dengan TPI-nya, relatif tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangganya.

Faktor lain adalah lokasi pemukiman baru mereka relatif mempengaruhi naik turunnya kesejahteraan ekonominya. Faktor terakhir, bergunanya sistem penguasaan/pemilikan rumah di pemukiman baru dan ada tidaknya pemberdayaan sosial ekonomi dalam penataan kehidupan barunya, akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mereka.

4. KESIMPULAN

Rekomendasi isu ekonomi nelayan kecil

Untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan kecil, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Dilakukan analisis dan kajian yang lebih rinci tentang potensi ekonomi pasca proyek NCICD bagi para nelayan kecil 2) Kapasitas pemodal nelayan kecil yang rendah perlu dibantu dengan pembentukan koperasi atau pemberdayaan unit ekonomi local 3) Pemerintah perlu membantu kepastian lahan dan kepastian pendapatan bagi para nelayan kecil

DAFTAR PUSTAKA

(Sumber: <https://jakarta.go.id>, 2020)
(Jakarta, 2022)
(FR, 2014)
(Utara, 2023)